

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian yang dilakukan adalah tentang “Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita terhadap Kemiskinan serta Hubungannya dengan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”. Jangka waktu dalam penelitian ini adalah lima tahun, yaitu dari tahun 2012-2016. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data panel. Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian tersebut:

1. Angka harapan hidup berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2012-2016. Hal ini menunjukkan bahwa jika angka harapan hidup meningkat, maka akan menurunkan kemiskinan.
2. Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2012-2016. Hal ini menunjukkan bahwa jika rata-rata lama sekolah meningkat, maka akan menurunkan kemiskinan.
3. Pengeluaran per kapita berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2012-2016. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengeluaran per kapita meningkat, maka akan menurunkan kemiskinan.
4. Kemiskinan memiliki hubungan negatif dan tingkat korelasi kuat dengan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2012-2016.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, terdapat implikasi sebagai berikut:

1. Pengaruh negatif Angka Harapan Hidup terhadap Kemiskinan karena Angka Harapan Hidup mencerminkan lamanya hidup yang ditempuh penduduk negara serta tercapainya akses maupun baiknya fasilitas kesehatan bagi penduduk yang negara bersangkutan. Kesehatan adalah hak bagi warga negara dan dilindungi oleh Undang-Undang, maka adanya peningkatan Angka Harapan Hidup dan produktifitas penduduk ialah input negara untuk meraih kesejahteraan sosial (*welfare society*). Tingkat kesehatan akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan warga negara. Oleh karena itu Angka Harapan Hidup merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah.
2. Pengaruh negatif Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan karena dengan pendidikan yang tinggi maka akan menyelamatkan penduduk dari jerat kemiskinan. Pendidikan ialah tujuan mendasar dari sebuah pembangunan negara. Pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kemampuan suatu negara untuk menyerap dan mengembangkan teknologi yang nantinya akan menurunkan kemiskinan dan tercipta pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Bagi individu, pendidikan yang tinggi akan meningkatkan keahlian dan menstimulasi produktifitas seseorang. Secara logis perusahaan akan memberikan *salary* tinggi untuk pekerja yang memiliki keahlian dan

produktifitas tinggi dan otomatis akan mengangkat derajat perekonomian keluarga dan menurunkan tingkat kemiskinan.

3. Pengaruh negatif Pengeluaran Per Kapita terhadap Kemiskinan karena standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya konsumsi perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk hidup layak. Tingkat kesejahteraan meningkat jika terjadi peningkatan konsumsi per kapita. Maka dapat dikatakan pengeluaran per kapita ukuran standar hidup layak karena dengan tingginya Pengeluaran Per Kapita akan tercapai kebutuhan dan hal-hal pokok lain sebagai penunjang kehidupan. Tercapainya kebutuhan inilah yang akan menurunkan tingkat kemiskinan.
4. Hubungan negatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Kemiskinan karena komponen dalam IPM terdiri dari tiga dimensi, komponen ini adalah hasil pembangunan yang diupayakan pemerintah melalui kebijakan. Komponen tersebut diyakini sebagai hal pokok dan hal mendasar untuk hidup dan mendapatkan kemampuan penduduk miskin keluar dari kemiskinan. IPM akan mengangkat produktivitas penduduk miskin, yang berhubungan dengan pendapatan mereka, kenaikan pendapatan mereka atas peningkatan kemampuan, peningkatan kemampuan itu pun selain meningkatkan kualitas sumber daya manusianya juga menyumbang untuk pertumbuhan ekonomi.

### **C. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan diharapkan membuat kebijakan dalam perbaikan kesehatan penduduk dan tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan produktivitas golongan ekonomi lebih produktif sebab apabila kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi serta meningkatkan pendapatan secara tak langsung. Program yang dapat dicanangkan dapat berupa pemerataan jaminan kesehatan kerja atau penerapan aturan wajib cuti yang sering dilanggar oleh perusahaan di seluruh provinsi di Indonesia.
2. Pemerintah harus lebih berkomitmen dengan meningkatkan kepekaan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya bersekolah. Hal ini perlu ditingkatkan serta disosialisasikan agar dalam jangka panjang terwujud SDM yang berkualitas, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Walaupun pemerintah telah mencanangkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) namun kurang memberikan dampak bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia karena pemberian KIP belum menyeluruh di seluruh provinsi, sehingga perlu adanya program yang memberikan keringan biaya secara penuh bagi siswa kurang mampu dan perbaikan fasilitas sarana pendukung dalam proses belajar mengajar. Misalnya, bantuan berupa alat tulis dan perlengkapan sekolah serta perbaikan kelengkapan sekolah seperti perpustakaan, meja serta bangku, dll.

3. Pengeluaran perkapita yang menggambarkan tingkat daya beli masyarakat dan tingkat kesejahteraan perlu mendapatkan pengawasan pemerintah khususnya dalam mengatur penetapan upah minimum yang mampu mengakomodir pengeluaran belanja rumah tangga. Besarnya upah minimum harus ditaati perusahaan karena masih banyak perusahaan ataupun usaha yang menetapkan pemberian gaji di bawah upah minimum. Meningkatkan kesejahteraan perlu adanya peningkatan nominal pengeluaran rumah tangga yang lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama.
4. Kemiskinan di Indonesia perlu ditanggulangi secara berkesinambungan, sebab banyak rakyat Indonesia dan khususnya di bagian Indonesia Timur yang masih berada dalam kemiskinan. Kesehatan, gizi, pendidikan dan upah minimum ialah isu krusial yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melakukan tinjauan program-program kemiskinan yang berjalan dan mengevaluasi program tersebut untuk mengarahkan Indonesia kepada kesejahteraan.
5. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada 2015 yang berada peringkat 113 dari 188 negara pada 2018 merupakan momentum negara Indonesia untuk meningkatkan akses penduduk terhadap hasil pembangunan dari berbagai hal seperti perbaikan gizi, fasilitas kesehatan, pelayan kesehatan, keterjangkauan terhadap pendidikan, perbaikan kualitas pendidikan dan perbaikan kehidupan perekonomian masyarakat agar lebih sejahtera. Pemerintah diharapkan dapat menginvestasikan dana untuk perbaikan didalam kategori diatas agar Indeks Pembangunan Manusia Indonesia meningkat.